

**TINJAUAN *MAQASYID SYARIAH* TERHADAP PASAL 167  
KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG RUJUK DI  
HADAPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum (S.H)



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh**

**DAFITRI AKBAR**

**NIM 11521101210**

**PROGRAM S1 JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan *Maqashid Asy-Syariah* Terhadap Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk Di Hadapan Pegawai Pencatat Pernikahan** yang ditulis oleh:

Nama : **Dafitri Akbar**  
 NIM : **11521101210**  
 Program Studi : **Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*)**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Rabiul Awwal 1441 H  
 21 November 2019 M

Pembimbing Skripsi

**Syukran M.Sy**  
 NIP. 130217035

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PENGESAHAN

Scripsi dengan judul **Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk Di Hadapan Pegawai Pencatat Pernikahan** yang ditulis oleh :

Nama : **Dafitri Akbar**  
 NIM : **11521101210**  
 Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telaha dimunaqasyahkan pada :  
 Hari/ Tanggal : **Rabu, 11 Desember 2019**  
 Waktu : **07.30 WIB**  
 Tempat : **Ruang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telaha di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dermawan Tia Indrajaya, S.Ag. M.Ag**

Sekretaris  
**Afrizal Ahmad M.Sy**

Penguji I  
**Dr. H. Mohd. Yunus, MA.**

Penguji II  
**Dr. H. Helmi Basri, Lc.,MA**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. penutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa  
 b. penutipan tidak meruikan kepentingan yang war UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakcipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim





## ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah Tinjauan *Maqashid Asy-Syariah* Terhadap Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk Di Hadapan Pegawai Pencatat Pernikahan.

Menurut hukum Islam keabsahan rujuk dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat rujuk yang dilakukan oleh suami. Menurut hukum positif di Indonesia, rujuk harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, di luar itu rujuk dianggap tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian dengan judul “Tinjauan *Maqashid Asy-Syariah* Terhadap Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk Di Hadapan Pegawai Pencatat Pernikahan”, memiliki rumusan masalah bagaimana konsep Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Tinjauan *Maqashid Asy-Syariah* Terhadap Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk Di Hadapan Pegawai Pencatat Pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan tinjauan *maqashid asy-syariah* terhadap Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan data sekunder, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif dan analisis konten.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa peraturan pemerintah menetapkan rujuk hanya dapat dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat, sejalan dengan *maqashid asy-syariah*. Bahwa sesungguhnya rujuk dihadapan pegawai pencatat nikah memberikan tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Karena di Indonesia, segala sesuatu itu harus berdasarkan hukum dan aturan tentang ini memberikan perlindungan bagi suami dan istri yang ingin melakukan rujuk.

Kata kunci: rujuk, *maqashid asy-syariah*, kompilasi hukum isla

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul: **Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk Di Hadapan Pegawai Pencatat Pernikahan**

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan *Dinullah* di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Akhmad Mujahiddin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III, serta seluruh civitas akademik di lingkungan UIN SUSKA Riau.
2. Bapak Dr. Hajar H, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III, serta seluruh civitas akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Akmal Abdul Munir, Lc, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Sekretaris jurusan Hukum Keluarga
4. Syukran M,Sy selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat serta arahan kepada penulis.
5. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda, Junaidi, yang penulis banggakan dan Ibunda tercinta Musfi Yanti, dan adik tersayang Hikmal Akbar yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Seluruh guru dan dosen yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat, serta dukungan kepada penulis.
7. Ucapan terima kasih penulis kepada semua sahabat yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terkhususnya seluruh kawan-kawan yang telah 4 tahun bersama-sama menuntut ilmu, Lokal AH A Hukum Keluarga Angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dan seluruh mahasiswa Hukum Keluarga Angkatan 2015
8. Terima kasih juga kepada teman-teman kos yang selalu member motivasi dan semangat dalam pembuatan skripsi ini
9. Terima kasih juga kepada guru-guru dan teman-teman musyrif tangguh Abdurrah Islamic School yang telah memberi semangat

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

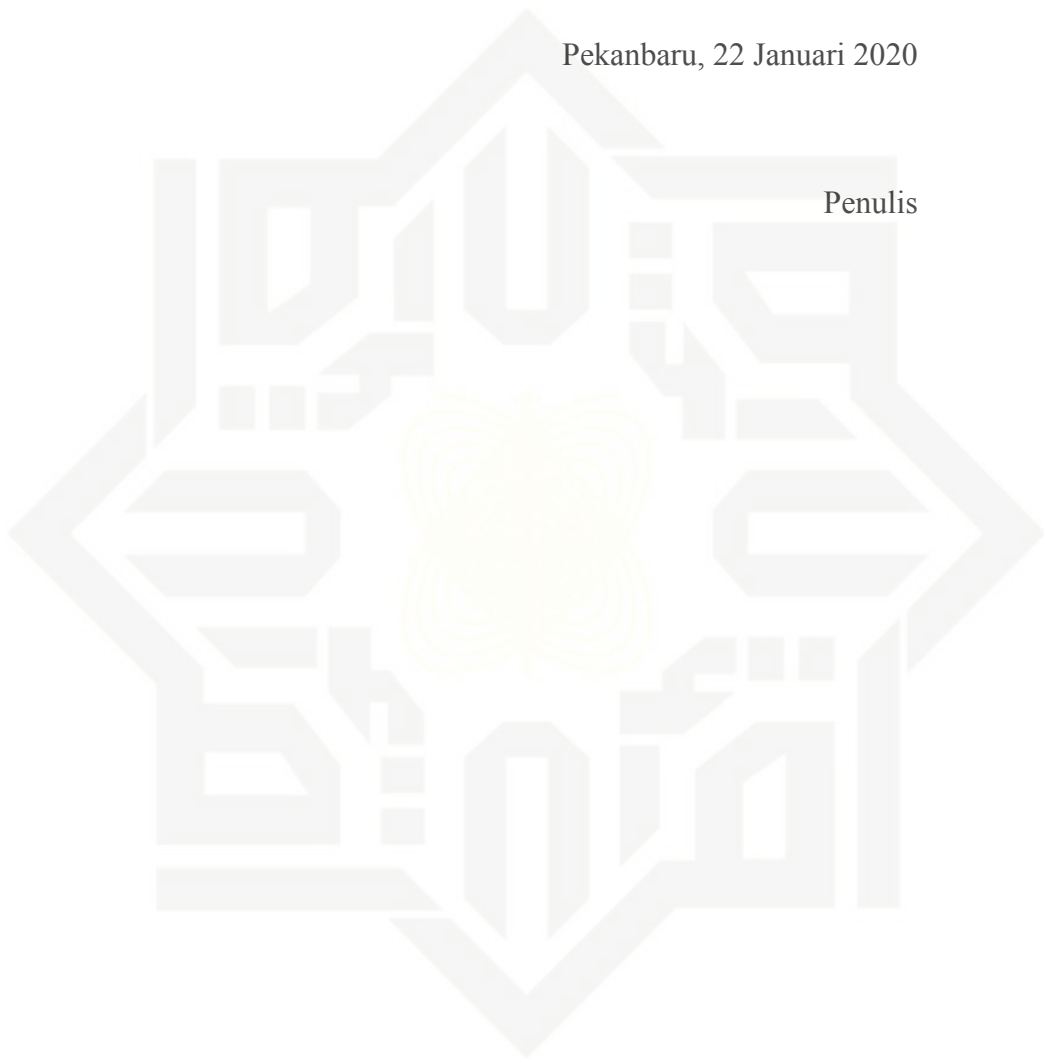
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Pekanbaru, 22 Januari 2020

Penulis



UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM</b>	
A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam .....	11
B. Sumber Perumusan KHI .....	18
C. Metode Perumusan KHI.....	20
<b>BAB III      TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK</b>	
<b>A. Rujuk</b>	
1. Pengertian Rujuk.....	27
2. Dasar Hukum Rujuk.....	29
3. Syarat-Syarat dan Rukun Rujuk.....	31
4. Macam-Macam Rujuk.....	32
5. Hikmah Disyari’atkan Rujuk .....	37
<b>B. Maqashid Syari’ah</b>	
1. Pengertian Maqashid asy-Syari’ah.....	38





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembagian Maqashid asy-Syari'ah .....	48
--	----

**BAB IV TINJAUN *MAQASHID ASY-SYARIAH* TERHADAP PASAL 167 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG RUJUK DI HADAPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH**

**A. Rujuk Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam**

1. Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	58
2. Dasar Hukum Rujuk.....	59
3. Klasifikasi Rujuk.....	63
4. Syarat dan Rukun Rujuk .....	65
5. Prosedur dan Pelaksanaan Rujuk .....	67

**B. Tinjauan *Maqashid Syaria'ah* Terhadap Pasal 167 KHI..**

72

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	87

**DAFTAR PUSTAKA .....**

89



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertalian perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Mengingat tujuan perkawinan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Maka Islam menggariskan beberapa aturan dan hukum mengenai pernikahan<sup>1</sup>.

Namun dalam setiap perjalanan pernikahan itu, terkadang semua itu ada masalah yang dihadapi oleh dua insan tersebut. Masalah tersebut tak jarang membuat terjadinya pertengkaran dan perkelahian antara kedua pasangan itu. Sehingga suatu perkawinan itu dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lainnya.

Talak tersebut berasal dari bahasa Arab yaitu kata “**إِطْلَاقٌ**” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan<sup>2</sup>. Talak itu dibagi menjadi dua yaitu talak raj’i dan talak bain. Dalam hal talak raj’i itu suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan istri benar-benar sudah digauli.

Allah berfirman dalam QS ath-Thalaq ayat 1:

<sup>1</sup> Muhammad Mutawil dan Rahmah Murtadha, *Mahar dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: Kaifa Publishing, 2018) cet. ke 1 hlm. 23

<sup>2</sup> Hitami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009) cet. ke 1 hlm. 229



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru<sup>3</sup>”

Ketika suami telah menjatuhkan talak raj’i ini kepada istri maka suami telah melepas istrinya tersebut. Sehingga dengan talak ini memiliki berapa dampak yaitu<sup>4</sup>:

1. Mengurangi jumlah talak
2. Berakhirnya ikatan suami-istri dengan terhentinya masa iddah
3. Kemungkinan untuk melakukan rujuk pada masa iddah
4. Pengharaman untuk melakukan persetubuhan menurut mazhab Syafi’i.

Jika suami telah menjatuhkan talaknya lalu suami ingin kembali lagi kepada istrinya, maka suami dapat melakukan rujuk kepada istrinya tersebut.

Menurut bahasa Arab, kata rujuk itu berasal dari kata رَجَعَ - يَرْجِعُ - رَجْعًا

<sup>3</sup> Kemenag Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Abyan, 2017), cet. ke 7 hlm. 558

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1997), jilid 9, hlm.384



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berarti kembali dan mengembalikan.<sup>5</sup> Rujuk adalah kembalinya suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Rujuk tersebut merupakan hak suami selama masa iddah karena tidak seorangpun yang dapat menghapus hak rujuk<sup>6</sup>. Allah berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :”dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana<sup>7</sup>.”

Hadist Nabi Muhammad SAW

عن عمران بن حصين رضي الله عنه ( انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال ا شهد على طلاقها و على رجعتها) رواه ابو داود هكذا موقوفا و سنده صحيح

Artinya : “Dari Imran putera Hushain r.a bahwasanya ia ditanya tentang laki-laki yang menceraikan isterinya kemudian merujuknya dengan tanpa saksi. Ia berkata : Hendaknya kamu saksikan dalam hal tolaknya dan dalam hal rujuknya. Hadist diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadist ini mauquf tetapi sunatnya shahih.<sup>8</sup>

Dalam merujuk istri para ulama berbeda pendapat, diantaranya<sup>9</sup>:

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008) cet. ke 5 hlm..

<sup>6</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta:Pustaka Amani, 2002) cet. ke 1, hlm. 313

<sup>7</sup> Kemenag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ayan, 2017), cet. ke 7 hlm. 36

<sup>8</sup> Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram* ( Semarang: PT Toha Putra) hlm. 554

<sup>9</sup> Al Hamdani, *op cit* hlm. 314-315





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Imam Malik berpendapat bahwa apabila seorang suami bersetubuh di masa Iddah dengan istri yang telah dithalaqnya dan ia bermaksud merujuknya tetapi ia tidak tahu bahwa rujuknya harus dipersaksikan maka perbuatannya dianggap rujuk.
2. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk harus dengan ucapan yang sharih, bagi yang dapat mengucapkannya dan dianggap tidak sah jika hanya dilakukan dengan berhubungan kelamin atau hal-hal yang mendorong untuk berhubungan kelamin seperti berciuman.
3. Imam Hanafi berpendapat bahwa rujuk itu dapat dilakukan dengan dua rukun yaitu sighthah dan perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut<sup>10</sup>.
4. Imam Hambali berpendapat bahwa rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak<sup>11</sup>.

Namun halnya di Indonesia, rujuk memiliki tata cara agak berbeda dan tersendiri bagi suami dalam melakukan rujuk kepada istrinya. Salah satu caranya itu disampaikan dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun tata cara rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu disebutkan pada pasal 167.

Bunyi pasal 167 yaitu<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006) cet. ke 1 hlm. 207

<sup>11</sup> Al-Jaziri, *Fiqh Msabib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Fikr) jilid 4 hlm. 377

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) cet. ke 1 hlm. 256



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. "Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau pembantu Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi syarat-syarat yang akan merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya
4. Setelah suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk
5. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk".

Melihat dari pendapat ulama tentang rujuk, itu dapat dilakukan hanya dalam lingkup suami dan istri saja, baik itu dilakukan dengan perkataan rujuk yang jelas ataupun tanpa perkataan rujuk tersebut. Tetapi, pasal 167 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 mengatakan "*(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*". Terlihat dari ayat (2) pasal 167 Kompilasi Hukum Islam ada sedikit tambahan yaitu dengan melakukan rujuk itu harus dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Permasalahan muncul ketika pasangan suami istri tidak melakukan aturan ini saat mereka ingin rujuk. Permasalahannya adalah



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam hal pembagian harta warisan. Pada saat suami istri tidak rujuk dihadapan pegawai pencatat nikah. Lalu jika salah satu nya meninggal, contoh suami meninggal dunia. Kemudian terjadi sengketa pembagian harta waris diantara keluarga suami dengan istri. Keluarga suami mempertanyakan apakah istri mendapat pembagian harta warisan ketika suaminya meninggal dunia sedangkan menurut aturan yang berlaku di tidak lagi dalam status suami dan istri karena tidak memiliki bukti rujuk?
2. Bagaimana status rujuknya ketika suami dan istri rujuk dalam masa iddah, dan baru melaporkannya disaat masa iddah itu habis? Apakah rujuk yang pertama bisa diterima atau rujuk yang sebenarnya apakah rujuk menurut aturan di Indonesia yaitu yang dikatakan rujuk harus dihadapan pegawai pencatat nikah.

Dari hal ini terlihat jelas ada perbedaan dalam tata cara rujuk dan permasalahan yang mengenai tentang rujuk tersebut. Maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pasal 167 pada Kompilasi Hukum Islam mengenai tentang rujuk ini dilihat dari *maqashid syariah* nya<sup>13</sup>. Apakah dalam tambahan aturan yang ada di Indonesia ini, memiliki *maqashid syariah* nya dan menjawab permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu maka penulis tertarik menulisnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “**TINJAUAN**

<sup>13</sup> *Maqashid asy-syariah* (maksud-maksud syariat) adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat. (Zaini Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Ardes Jaya, 1987), hlm. 52) Tujuan pokok dari syariat Islam adalah memelihara kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun di hari yang *baqa* (kelal), atau biasa disebut dengan “*جلب المصالح ودفع المفاسد*” (*meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan*) ( H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 8)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **MAQASHID ASY-SYARIAH TERHADAP PASAL 167 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG RUJUK DI HADAPAN PEGAWAI PENCATAT PERNIKAHAN”.**

### **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahannya, penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun batasan masalah tersebut adalah mengenai tinjauan *maqashid asy-syariah* terhadap Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk harus di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanan konsep Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid asy-syariah* terhadap Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang konsep Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam.
  - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan *maqashid asy-syariah* terhadap Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk harus di hadapan Pegawai Pencatat Nikah .





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai penyelesaian akhir dalam mendapatkan gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian fiqh sebagai suatu topik spesifik pada Fakultas Syariah dan Hukum.
- c. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum secara khusus dan mahasiswa UIN SUSKA secara umum.

### E. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara *library research*, yaitu melakukan penelitian melalui kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang ada kaitannya dengan inti permasalahan.

#### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu bahan yang dijadikan sebagai sumber utama, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Data sekunder yang diambil dari kaitan dengan judul, yaitu: kitab *al-Muwafaqat* karangan Abu Ishaq al-Syathibi *Fiqhal-Islamiyah wa Adhillatuhu* karangan Wahbah Zuhailly, dan juga buku-buku yang berkaitan lainnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Analisis Data

- a. Deskriptif, yakni menghimpun data-data sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan penulisan skripsi.
- b. Analisis konten, yakni analisis data atau pengolahan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan atau komunikasi. Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan.
- c. Komperatif, yakni analisis perbandingan pendapat antara yang satu dengan yang lainnya yang pendapat itu mempunyai perbedaan

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I :** Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

**BAB II :** Bab ini berisi landasan teori KHI (Kompilasi Hukum Islam), diantaranya lahirnya Kompilasi Hukum Islam dan peran penting Kompilasi Hukum Islam di Indonesia



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: Bab ini berisi landasan teori tentang rujuk, definisi rujuk, dasar hukum, rukun dan syarat rujuk, dan hikmah pensyariatan rujuk.

BAB IV : Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan, yaitu:

- a. Konsep Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Tinjauan *maqashid asy-syariah* terhadap Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk harus di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

BAB V : Kesimpulan dan saran-saran dalam skripsi ini.

Daftar Pustaka



## BAB II

### KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

#### A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Secara yuridis formal keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali pada saat proklamasi kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 diakuinya sebagai berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Betapun juga, berbicara Hukum Perdata Islam di Indonesia, tidak bisa terlepas dari eksistensi Negara Indonesia itu sendiri, yang sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam.

Keinginan para pemimpin Islam untuk dapat kembali menjalankan hukum Islam untuk dapat kembali menjalankan hukum Islam setelah secara “sistematis” dikebiri oleh Pemerintah Kolonial melalui teori *receptie* Snouk Hurgronje, telah dimulai sejak perumusan dasar Negara pada saat BPUPKI bersidang. Disahkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yang mencantumkan tujuh kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya” kemudian disepakati direvisi menjadi rumusan final pada Sila Pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama dalam Pancasila tersebut, kemudian dijabarkan dalam Pasal 29 Batang Tubuh UUD 1945, yang berbunyi: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah diremuskannya UUD 1945, langkah yang ditempuh pemerintah ialah menyerahkannya pembinaan Peradilan Agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Peraturan Pemerintah No. 5/SD/1946. Pada tahun 1948 dikeluarkan UU No 19 Tahun 1948 yang memasukkan Peradilan Agama ke Peradilan Umum. Karena muatan undang-undang ini tidak sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, undang-undang ini tidak pernah dinyatakan berlaku.<sup>14</sup> Sampai dengan dikeluarkannya UU Darurat No. 1 Tahun 1951 Peradilan Agama tetap berjalan sebagaimana adanya.

Pada tahun 1957, melalui Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1957, Pemerintah Republik Indonesia mengatur pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan. Kewenangannya meliputi: nikah, talak, rujuk, fasakh, nafaqah, mahar, tempat kediaman, mut'ah, hadanah, perkara waris mewaris, wakaf, hibah, shadaqah, dan baitul mal.<sup>15</sup> Pada tahun 1970 dikeluarkan UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) menyatakan; "Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-Badan Peradilan dan ditetapkan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya". Selanjutnya dalam pasal 10 dinyatakan : "Kekuasaan Kehakiman di Negara Republik Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam

<sup>14</sup>Munawir Sjadzali, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*", dalam Tjun Surjaman, *Hukum Islam di Indonesia dan Praktek*, (Bandung: Rosda Karya, 1991) cet. ke 1 hlm. 47

<sup>15</sup>*Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan: (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer, (d) dan Peradilan Tata Usaha Negara<sup>16</sup>.

Berbagai rintangan dilewati oleh umat Islam dalam mendapatkan suatu Peradilan Agama, maka pada tanggal 29 Desember 1989 melalui Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, disahkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keberhasilan umat Islam Indonesia (menteri Agama, ulama) dalam menggolkan RUU PA menjadi Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah berarti semua persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata persoalan krusial yang dihadapi adalah berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Sacara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman putusan hakim.

Berangkat dari realistik ini keinginan untuk menyusun "kitab hukum Islam" dalam bentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum di PA di Indonesia, tetapi juga disandarkan pada

<sup>16</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.

Adalah Bushtanul Arifin tampil dengan gagasan perlunya membuat kompilasi Hukum Islam. Gagasan-gagasannya didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal: (a). Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu, (b). Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu dan (c). Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
3. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga negara, hukum Islam diberlakukan (a) Di kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama *Majallah al-Ahkam Al-Adliyah* dan (b). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasi di Subang.

Gagasan Busthanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim Pelaksanaan Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985. Dalam Tim tersebut Bushtanul dipercaya menjadi Pemimpinan Umum dengan anggota Tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota Tim dan ulama-ulama, cendekiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuskanlah KHI<sup>17</sup> yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991<sup>18</sup>.

Memang Kompilasi Hukum Islam tidak diundangkan lewat undang-undang sebagaimana yang terjadi pada UU No.1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. Hal ini menurut Nur Ahmad Fadil Lubis merupakan persoalan yang sangat sensitif untuk dilakukan di negara Indonesia yang sangat plural dari sisi agama dan ideologi.

Dengan keluarnya Inpres dan SK tersebut menurut Abdul Gani Abdullah sekurang-sekurangnya ada tiga hal perlu dicatat:

1. Perintah menyebarluaskan KHI tidak lain adalah kewajiban masyarakat Islam untuk memfungsikan eksplanasi masyarakat Islam untuk memfungsikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang mengenai normatif sebagai hukum yang harus hidup dalam masyarakat.
2. Rumusan hukum Islam dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No.7 Tahun 1989 tentang segi-segi hukum formalnya.

<sup>17</sup> Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr.H, Busthanul Arifin, SH*, (Jakarta; Gema Insani Pers,1996) cet. ke 1 hlm. 11-12

<sup>18</sup> *Ibid*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan KHI dengan sebutan Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlakukannya, dalam kedudukan sebagai pedoman penyelesaian masalah di tiga bidang hukum dalam KHI. Kendati KHI telah diputuskan untuk digunakan dalam lingkup Peradilan agama, tetap saja menimbulkan polemik. Apakah KHI itu termasuk hukum tertulis hukum tertulis seperti kitab hukum lainnya atau hukum yang tidak tertulis. Adalah Attamimi yang mencoba mengkritik sebagian orang berpandangan bahwa KHI itu sebagai hukum tertulis.

Bagi Attamimi Kompilasi adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur. Dengan demikian KHI adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah, bukan Keputusan Presiden dan seterusnya. KHI menunjukkan hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan<sup>19</sup>.

Dalam kesimpulannya ia menyatakan,

KHI meskipun ditulis belum merupakan hukum tertulis. Karena sistem Hukum Nasional Indonesia mengakui hukum tertulis dan hukum tidak tertulis,

<sup>19</sup>Aminur Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004) cet. ke 1 hlm. 33



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka KHI dapat mengisi hukum umum, khususnya mengisi kekosongan hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam”.

Berkaitan dengan Intruksi Presiden, Attamimi mengatakan:

“Adalah sesuatu bahwa penyebarluasan KHI dilakukan dengan Intruksi Presiden, bukan dengan Keputusan Presiden, dan lebih-lebih bukan dengan Undang-Undang. Dengan demikian, salah paham beberapa pihak yang menyangka bahwa KHI seolah-olah usaha kembali ke Piagam Jakarta-dapat disinggahi”

Pendapat Attamimi ini ditolak oleh Abdul Gani Abdullah dengan menyatakan.

“Pertama, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Kelemahan pandangan ini terletak pada pengabdian terhadap beberapa sumber pengambilan bagi penyusunan buku I, dan III yang terdiri dari UU No.22 Tahun 1946 Jo UU No.32 Tahun 1954, UU No.1 Tahun 1974 Jo PP No.9 Tahun 1975, PP No. 28 Tahun 1977. Sumber-sumber tersebutlah yang mengakrabkan KHI menjadi sumber hukum tertulis. Kedua, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Sumber yang ditunjukkan di atas menunjukkan KHI berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *potical power*. Inpres No.1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan KHI dalam jajaran *law*.”



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terlepas dari polemik yang sebenarnya sangat teoritis, kumunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai oleh umat Islam. Menurut Yahya Harahap, KHI itu diharapkan dapat, *Pertama*, Melengkapi Pilar Peradilan Agama. Kedua, Menyamakan Persepsi penerapan Hukum. Ketiga, Mempercepat proses *taqrib bainal ummah*. Keempat, Menyingkirkan paham *private Affair*.<sup>20</sup>

Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan para hakim di Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam di Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan hukum Islam.

#### B. Sumber Perumusan KHI

Dari proses penyusunan KHI dari awal sampai akhir dengan segala tahapnya diketahui bahwa yang menjadi sumber rujukan bagi penyusunan KHI itu adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:

<sup>20</sup>Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Memositifkan Abstraki Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum*, No.4 Tahun II,1991, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Departemen Agama,1991) cet. ke 1 hlm. 27-29

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakaha dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006) cet. ke 5 hlm. 24-25



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Hukum Perundangan-undangan berkenaan dengan perkawinan, yaitu UU No. 32 Tahun 1954; UU No 1 Tahun 1974; PP No.9 Tahun 1975 dan PP No.7 tahun 1989. Penempatan UU No. 7 Tahun 1989 sebagai rujukan, memang terasa agak janggal; karena UU No.7 Tahun 1989 itu diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, sedangkan Lokalkarya Ulama sebagai tahap akhir dari kegiatan penyusunan KHI berlaku pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Februari 1988. Namun kenyataannya materi yang terdapat dalam KHI berkenaan dengan Hukum Acara, hampir semuanya sama dengan rumusan yang terdapat pada UU No.7 Tahun 1989. Mungkin materi yang terdapat dalam KHI tersebut diambil dari Rancangan UU yang memang sudah lama dipersiapkan.

b) Kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, meskipun yang terbanyak adalah dari mazhab Syafi'iy. Dari daftar kitab fiqh yang telah ditelaah untuk perumusan KHI itu kelihatannya kitab-kitab tersebut berasal dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Zhahiri. Memang pernah digunakan kitab fiqh dari mazhab Syiah Imamiyah dalam telaah kitab itu, yaitu *al-Mabsuth fi fiqh al-Imamiyah*, karya al-Thusiy, namun dalam daftar kitab yang dibaca tidak ada kelihatan kitab fiqh yang berasal dari mazhab Syi'ah Imamiyah tersebut.

c) Hukum Adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama, namun kelihatannya tidak banyak yang langsung diambil dari KHI dari Hukum Adat. Seandainya da praktik adat itu terdapat dalam KHI, seperti harta bersama dalam





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, namun tidak diambil KHI dari Hukum Adat secara langsung, tetapi dari UU yang telah lebih dahulu mengambil dari Hukum Adat. Mungkin yang dapat dijadikan contoh pengambilan dari adat itu adalah bolehnya mengawini perempuan hamil karena zina, yang kebetulan juga diakui oleh fiqh munakahat

### C. Metode Perumusan KHI

Dalam teknis pelaksanaannya, SK Bersama tersebut menunjukkan Pemimpin Umum, Prof. H. Bustanul Arifin, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan MA dibantu dua orang wakil pemimpin umum, yaitu HR. Djoko Soegianto, S.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Bidang Hukum Perdata Tidak Tertulis MA dan H. Zaini Dahlan, M.A. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

Pimpinan pelaksana proyek ditunjuk H. Masrani Basran, S.H. Hakim Agung M.A dan wakilnya H. Muchtar Zarkasyi, S.H. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Sekretaris Ny. Lies Sugondo, S.H. Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dan wakilnya Drs. Mafruddin Kosasih, Bendahara Alex Marbun dari MA dan Drs. Kadi dari Departemen Agama. Di samping itu ada pelaksana bidang, meliputi<sup>22</sup>:

#### a) Bidang/Kitab Yurisprudensi:

- 1) Prof. H. Ibrahim Hoesain, LML (dari Majelis Ulama)
- 2) Prof. H. MD. Kholid, S.H (Hakim Agung M.A)

<sup>22</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta:Rajawali Pres, 2013 ) cet. ke 1 hlm. 38



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Wasit Aulawi, M.A (dari Departemen-Kementrian-Agama)

b) Bidang Wawancara:

1) M. Yahya Harahap S.H (Hakim Agung)

2) Abdul Gani Abdullah, S.H (Departemen Agama)

c) Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data:

1) H. Amiroedin Noer, S.H (hakim Agung)

2) Drs. H. Muhaimin Nur, S.H (Departemen Agama)

Dari bidang-bidang diatas maka mereka menggunakan beberapa metode dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun metode yang digunakan yaitu

#### 1. Pengkajian Kitab-Kitab Fiqh

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab fiqh sebanyak 38 yang dimintakan kepada tujuh IAIN yang ditunjuk untuk mengkaji kitab-kitab fiqh tersebut dan memberi pendapatnya, disertai argumentasi / dalil-dalil hukumnya. IAIN yang ditunjuk melalui Kerja sama Menteri Agama dan Rektor IAIN tanggal 19 Maret 1986 adalah:

a. IAIN Arraniri Banda Aceh mengkaji kitab-kitab: *al-Bajuri*, *Fath al-Muin*, *Syarqawi 'ala al-Tahrir*, *Mughni al-Muhtaj*, *Nihayah al-Muhtaj*, dan *Al-Syarqawi*.

b. IAIN – sekarang UIN – Syarif Hidayatullah Jakarta mengkaji kitab-kitab: *I'anat al-Thalabin*, *Tuhfah*, *Targhib al-Musytaq*, *Bulghah al-Salik*, *Syamsuri fi al-Faraidl*, dan *al-Mudawanah*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. IAIN Antasari Banjarmasin mengkaji kitab-kitab: *Qalyubi/Mahalli, Fath al-Wahab* dan *Syarahnya, Bidayah al-Mujtahid, al-Um, Bughyah al-Mustarsyidin*, dan *al-Aqidah wa al-Syari'ah*.
- d. IAIN – sekarang UIN – Sunan Kalijaga Yogyakarta mengkaji Kitab-kitab: *Al-Muhalla, al-Wajiz, Fath al-Qadir, Kitab al-Fiqh 'ala al-Muzahib al-Arba'ah*, dan *Fiqh al-Sunnah*.
- e. IAIN Sunan Ampel Surabaya mengkaji kitab-kitab: *Kasyf al-Ghina, Majmu'at Fatawa al-Kubra li Ibn Taymiyah, Qawanin al-Syariah li al-Sayid Utsman ibn Yahya, al-Mughni*, dan *al-Hidayah Syarh al-Bidayah*
- f. IAIN – sekarang UIN – Alauddin Ujung Pandang mengkaji kitab-kitab: *Qawanin al-Syariah li al-Sayyid Shadaqah Dahlan, Nawab al-Jalil, Syarah Ibn Abidin, al-Muwaththa* dan *Hasyiyah al-Dasuqi*.
- g. IAIN Imam Bonjol Padang mengkaji kitab-kitab: *Badai al-Shana'i, Tabyin al-Haqaiq, al-Fatawa al-Hindiyah, Fath al-Qadir* dan *Nihayah*.

Selain itu pengkajian kitab-kitab tersebut, juga diambil hasil-hasil fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdhatul Ulama (NU), Majelis tarjih Muhammadiyah, dan lain-lain.

#### 2. Wawancara dengan Para Ulama di Seluruh Indonesia

Untuk kepentingan ini ditetapkan sepuluh lokasi: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Padang, Mataram dan Banjarmasin. Teknis pelaksanaan wawancaranya, menurut Bustanul Arifin, dilakukan melalui dua acara. *Pertama*, mempertemukan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka untuk diwawancarai bersama-sama, dan *kedua*, dengan cara terpisah, apabila cara pertama tidak mungkin dilaksanakan.

Adapun pemelihan tokoh yang diwawancarai, dilakukan oleh Panitia Pusat bekerja samadengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama setempat dengan acuan yaitu semua unsur organisasi Islam yang ada diikutsertakan sebagai komponen dan Tokoh Ulama yang berpengaruh di luar unsur organisasi yang ada, dan diutamakan yang mengasuh lembaga pesantren. Pelaksanaan dengan jaur ini diharapkan-kompilasi yang menurut Hasan Basri, sekedar menghimpun dan mengumpulkan fikih yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang selama ini telah banyak diamalkan oleh umat Islam sendiri dengan meninggalkan pendapat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman – hasil kompilasi tersebut, insya Allah akan cukup aspiratif tidak ada unsur paksaan.

#### 3. Jalur Yurisprudensi

Penggarapan jalur ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam lima belas buku:

- a. Himpunan Putusan PA/PTA 3 buku, terbitan 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981
- b. Himpunan fatwa 3 buku, terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980 dan 1980/1981
- c. Yurisprudensi PA 5 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Law report 4 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984

#### 4. Jalur Studi Perbandingan

Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi negara-negara Muslim antara lain Pakistan, Mesir, dan Turki. Dalam kenyataannya, studi banding tersebut dilaksanakan ke Timur Tengah, yaitu ke Maroko (28-29 Oktober 2019), Turki (1-2 November 1986), dan Mesir (3-4 November 1980) oleh M. Masrani Basran S.H dan H. Muchtar Zarkasyi, S.H. Hasil studi banding tersebut meliputi:

- a. Sistem peradilan
- b. Masuknya *syariah law* dalam hukum nasional
- c. Sumber hukum dan hukum materiil yang menjadi pegangan/terapan hukum di bidang *al-Ahwal al-Syakhsyah* yang menyangkut kepentingan Muslim.

Selain jalur-jalur di atas beberapa organisasi Islam mengadakan seminar tentang Kompilasi Hukum Islam, diantaranya diselenggarakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 8-9 April 1986 di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dihadiri Menteri Agama dan Ketua Umum MUI KH. Hasan Basri. Syuriah PWNU Jawa Timur, mengadakan *bathsul masail* tiga kali di tiga pondok pesantren, yaitu Tambak Beras, Lumajang dan Sidoarjo.

Sebagai puncak kegiatan proses dan perumusan Kompilasi Hukum Islam, setelah pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan draft oleh tim yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditunjuk, diadakan Lokakarya Nasional dalam rangka menyempurnakan kerja tim. Lokakarya ini dimaksud untuk menggalang ijma (konsensus) ahli-ahli hukum Islam dan hukum umum di Indonesia. Ini sekaligus merupakan refleksi dan puncak perkembangan pemikiran fiqh Indonesia. Lokakarya ini berlangsung selama 5 hari, tanggal 2-6 Februari 1988 bertempat di Hotel Kartika Candra Jakarta, diikuti 124 peserta dari seluruh Indonesia. Dalam lokakarya ini dibagi ke dalam tiga komisi:

Komisi I membidangi Hukum Perkawinan, diketuai oleh H.Yahya Harahap sekretaris H. Mafruddin Kosasih, dengan narasumber KH.Halim Muchammad, S.H beranggotakan 42 orang.

Komisi II membidangi Hukum perkawinan, diketui oleh H.A Wasit Aulawi, MA, sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar , dan narasumber K.H.A Azhar Basyir, MA beranggotakan 42 orang.

Komisi II membidangi Hukum Perwakafan, diketui oleh H. Masrani Basran, sekretaris H. A. Gani Abdullah, S.H. dengan narasumber Prof. Rachmat Djanika, beranggotakan 29 orang

Dari hasil rumusan lokakarya tersebut, berbagai pihak menghendaki kompilasi tersebut dituangkan dalam bentuk undang-undang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran apabila harus ditempuh melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan sulit dan memakan waktu berlarut-larut. Ada juga keinginan, agar kompilasi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Akhirnya, melalui cara “potong kompas” Mahkamah Agung bekerja sama dengan Departemen – Kementrian – Agama atas restu



Presiden pada tanggal 10 Juni 1991 disahkanlah Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK

### A. Rujuk

#### 1. Pengertian Rujuk

Menurut bahasa arab, kata *rujuk* berasal dari kata "رَجَعَ - يَرْجِعُ - رَجْعًا" yang berarti kembali dan mengembalikan<sup>23</sup>. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenalkan istilah "*ruju*" dan istilah "*raja'ah*" yang keduanya semakna. Sedangkan secara terminologis, rujuk itu memiliki beberapa pengertian yaitu:

1. Menurut Imam Malik rujuk adalah kembalinya isteri yang telah ditalak selain *ba'in*, kepada perlindungan suami, dengan tanpa ada pembaharuan akad serta dalam masa *iddah*<sup>24</sup>
2. Menurut Imam Syafi'i rujuk adalah

الرجعة اعادة احكام الزواج في أثناء العدة بعد الطلاق

"mengembalikan status seorang wanita dalam satu ikatan perkawinan dari talak yang bukan *ba'in* dalam masa *iddah* melalui cara-cara tertentu".<sup>25</sup>

3. Menurut Imam Hambali rujuk adalah mengembalikan keadaan isteri kepada keadaan yang semula setelah terjadinya talak *raj'i* dan masih berada dalam masa *iddah* tanpa akad yang baru

<sup>23</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung:CV. Pustaka Setia, 1999) cet. ke 1 hlm. 285

<sup>24</sup> Abd. Ghofar, *ar Raja'ah fi al-Islam*, hlm. 21

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 23





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Menurut Imam Hanafi rujuk adalah

الرجعة استدامة النكاح في أثناء عدة الطلاق

"melanjutkan pernikahan dengan bekas isteri yang ditalak *raj'i* dalam masa *iddah*"<sup>26</sup>

Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa idah, dengan ucapan tertentu.<sup>27</sup>

Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami dan istri meskipun berstatus talak *raj'i*, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal yang serupa itu. Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa idah berhak merujuk bekas istrinya dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami yang dimaksud.

Pengertian rujuk ini juga diisyaratkan dalam pasal 163 KHI yaitu: seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa *iddah*. Dengan demikian

<sup>26</sup> Abd. Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzib Al-Arba'ah juv IV*, hlm. 375

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013) cet. ke 1 hlm. 253



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas bahwa rujuk hanya dapat dilakukan ketika mantan isteri dalam masa *iddah*.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Rujuk

Setelahnya adanya pemaparan tentang pengertian rujuk tersebut, maka perlu disampaikan beberapa dasar hukum tentang penetapan sahnyanya rujuk.

Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana<sup>29</sup>.”

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234:

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm 53

<sup>29</sup> Kemenag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Abyan, 2017), cet. ke 7 hlm. 36



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



Artinya: "orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."<sup>30</sup>

Dengan demikian sunnah hukumnya bagi suami untuk merujuk isterinya, apabila dilandasi oleh niat yang tulus dan benar-benar menghendaki adanya *islah* (perdamaian) diantara keduanya. Dan haram hukumnya apabila hanya untuk main-main, menyakiti, melecehkan maupun untuk balas dendam sehingga isteri tidak menikah dengan laki-laki lain. Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَسْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan

<sup>30</sup> Kemenag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ayan, 2017), cet ke 7 hlm 38



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu al kitab dan al Hikmah (as Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu<sup>31</sup>”.

### 3. Syarat-Syarat dan Rukun Rujuk

Adapun syarat sahnya rujuk itu adalah sebagai berikut<sup>32</sup>:

1. Menurut ulama Mazhab Maliki, Syafi’I dan Hanbali, suami yang rujuk itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan atas kesadaran sendiri bukan orang murtad. Alasan mereka adalah bahwa rujuk itu sama dengan memulai akad nikah baru. Oleh sebab itu, tidak sah dilakukan oleh anak kecil, orang murtad, orang mabuk dan orang yang dipaksa. Akan tetapi menurut pendapat ulama Mazhab Hanafi, anak kecil boleh melakukan rujuk karena nikahnya juga sah, sekalipun tergantung kepada izin walinya.
2. Menurut Mazhab Syafi’I<sup>33</sup>, bagi orang yang biasa bicara rujuk harus dinyatakan dengan ungkapan yang jelas atau sindiran. Oleh sebab itu, sekedar perbuatan seperti melakukan senggama, tidak menunjukkan rujuk bagi mereka. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, termasuk Mazhab Hanafi, rujuk biasa dilakukan secara lisan dan biasa juga dengan langsung melakukan senggama dengan istrinya. Tetapi, jika rujuk dilakukan secara

<sup>31</sup> Ibid hlm.38

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta:PT Intermasa, 1996) cet. ke-2 hlm. 1509

<sup>33</sup> Ibid





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lisan, maka kata-kata itu harus jelas, dan tidak mengandung pengertian lain.

3. Status istri tersebut masih dalam masa iddahnya dan sebelum ditalak, istri tersebut telah digauli karena wanita yang diceraikan sebelum digauli talaknya termasuk talak *ba'in sugra*, dan tidak perlu iddah. Oleh sebab itu, untuk merujuknya dengan akad nikah yang baru.

4. Rujuk itu sendiri harus dilakukan secara langsung, bebas dari segala macam prasyarat, seperti ungkapan suami, "Saya akan kembali kepada engkau jika engkau suka"<sup>34</sup>.

Adapun rukun rujuk itu adalah

1. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, rukun rujuk itu ada dua, yaitu *sigah* (pernyataan keinginan kembalidari suami) dan perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut.
2. Menurut ulama Mazhab Syafi'i, rukun rujuk itu adalah sighthat dan suami yang akan rujuk.
3. Menurut ulama Mazhab Hanbali, rukun rujuk itu adalah sigat, suami yang akan rujuk dan pergaulan suami istri (jimak),
4. Menurut ulama Mazhab Maliki, rukun rujuk itu adalah perbuatan yang menunjukkan bahwa suami itu rujuk atau niatnya, serta istri yang dirujuk.

#### 4. Macam-Macam rujuk

<sup>34</sup> Ibid



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rujuk dibagi menjadi dua jenis, yaitu rujuk dari *talaq raj'I* dan rujuk dari *talaq ba'in*. Rujuk dari *talaq raj'I* boleh dilakukan dengan ucapan menurut *ijtima' fuqaha*<sup>35</sup>.

#### 1. Rujuk dengan ucapan atau perkataan

Rujuk dengan perkataan ini merupakan suatu cara kembalinya suami kepada bekas istrinya yang disepakati oleh para *fuqaha*. Hal ini tergambar dari ungkapan Ibn Rusyd berikut ini<sup>36</sup>:

جمع المسلمون على ان الزوج يملك رجعة الزوجة فى الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها لقول تعالى (و بعولتهن أحق بردهن في ذلك) و ان من شرط هذه الطلاق تقدم المسيس له و اتفقوا على أنها تكون بالقول و الاشهاد

Artinya : "sudah merupakan ijma' ulama bahwa sesungguhnya suami memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya yang dalam keadaan talak raj'I selama dalam masa iddah tanpa memperhatikan persetujuan dari istri tersebut, berdasarkan firman Allah Swt: (para suami berhak rujuk kepada mereka (istri) dalam masa iddah). Sesungguhnya sebahagian dari syarat talaq raj'I ini adalah melakukan hubungan suami istri sebelumnya. Para fuqaha telah menyepakati bahwa sesungguhnya rujuk tersebut dilangsungkan dalam bentuk perkataan disertai saksi".

Menurut mazhab Asy-syafi'i rujuk terjadi dari orang yang berbicara mengenai rujuk , baik secara terang-terangan misalnya "aku rujuk kamu", "aku kembalikan kamu" dan "aku tahan kamu". Juga dengan makna lafaz-lafaz ini dan sejenisnya dari semua bahasa. Apakah orang tersebut mengetahui bahasa arab atau tidak. Juga apakah dia sandarkan rujuk kepadanya , atau kepada pernikahannya. Seperti ucapannya "kepadaku, atau kepada

<sup>35</sup> ad-Dardiri, Abu al-Barakah Ahmad Bin Muhammad, *Syar ash-shaghir Aqrabi al-Masalik Illa Mazhab al-Imam Malaik*, (Kairo : Daar Al-Ma'arif), jus 2, hlm. 610

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Maktabah al-Islamiyyah, 1348 H), hlm 93



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahanku, ataupun tidak”. Akan tetapi disunnahkan ucapan ini. Dan harus menyandarkan rujuk kepada sesuatu yang dzahir, seperti, “aku rujuk si Fulanah”, atau secara tersembunyi seperti, “aku rujuk kamu” atau dengan isyarat seperti “aku rujuk orang ini”.

Asy-Syafi’I berpendapat bahwa rujuk harus dengan ucapan yang *sharih*. Dan yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah apabila hanya dilakukan dengan perbuatan (hubungan kelamin) atau hal-hal yang mendorong untuk berhubungan kelamin seperti berciuman. Ia mengatakan “sesungguhnya rujuk berupa perbuatan itu haram, karena Allah telah menyebutkan perlunya kesaksian dan kesaksian itu tidak dapat diberikan kecuali dengan ucapan.” Asy-Syafi’I beralasan bahwa itu membubarkan perkawinan, maka tidak sah rujuk dengan ucapan<sup>37</sup>.

Ulama Malikiyah berpendapat sebagaimana yang dinukilkan oleh Wahbah Zuhaili<sup>38</sup>:

ولابد ان ينوي الارتجاع مع القول أو مع الفعل جلافا للحنيفة كمل بينا لأن تصرف الزوج يحتاج الى دلالة قوية على رغبته في اعادة المطلقه و هو يكون بالنيه

Artinya : “Suami mesti meniatkan dalam bentuk perkataan atau perbuatan, berbeda dengan pendapat Hanafiyah, yang telah kami jelaskan. Karena tindakan suami membutuhkan dialah yang kuat yang menunjukkan kesungguhannya dalam merujuk istri yang telah ditalak. Semua itu hanyalah dengan niat”.

<sup>37</sup> Said bin Abdullah, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) cet. ke 1 hlm.

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damsiq : Dar al-fikr, 1989) cet. ke 3 j 7, hlm. 466



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa ulama malikiyah cenderung menempatkan niat sebagai unsur utama yang menyertai rujuk. Karena dengan niat tersebut akan tergambar kesungguhan dari suami untuk merujuk bekas istrinya.

#### 2. Rujuk dengan Perbuatan

Mengenai rujuk dengan ucapan telah terjadi *ijma'* ulama bahwa rujuk dengan ucapan diperbolehkan. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk tidak sah jika dilakukan dengan bentuk perbuatan. *Fuqaha* berpendapat bahwa rujuk harus dengan “menggauli” istri, dan pendapat ini terbagi menjadi dua golongan:

Golongan pertama, berpendapat bahwa rujuk dengan penggaulan hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Karena bagi golongan ini, perbuatan disamakan dengan kata-kata beserta niat. Pendapat ini dikemukakan Imam Malik. Golongan kedua, yakni Abu Hanifah, mempersoalkan dengan penggaulan, jika ia bermaksud untuk merujuk dan ini tanpa niat<sup>39</sup>.

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah disebabkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu mengakibatkan halalnya penggaulan, karena dipersamakan dengan istri yang dia ila' (sumpah tidak akan menggauli istrinya) dan istri yang terkena zhihar (pengharaman istri untuk dirinya), disamping karena hak milik atas istri belum terlepas daripadanya, dan karena itu terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa menggauli istri yang

<sup>39</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), jilid II cet. ke 3 hlm. 592





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertalak raj'I adalah haram, sehingga suami merujuknya. Oleh karena itu diperlukan niat<sup>40</sup>.

Imam Syafi'i berpendapat tidak sah. Pendapat ini bertitik tolak dengan pemahamannya terhadap ayat (2) surat at-Thalaq tentang persaksian tentang rujuk

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar<sup>41</sup>,”

Menurut kelompok Asy-Syafi'i di dalam ayat di atas, Allah Swt menyuruh supaya rujuk di persaksikan, sedangkan yang dapat dipersaksikan dengan rujuk itu hanyalah rujuk dengan perkataan. Sedangkan rujuk dengan perbuatan tentu tidak dapat dipersaksikan oleh orang lain.

Kebanyakan ulama yang lain yang berpendapat bahwa rujuk dengan perbuatan sah (boleh). Mereka beralasan kepada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228:

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) cet. ke 3 hlm. 291

<sup>41</sup> Kemenag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Abyan, 2017), cet. ke 7 hlm. 558



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا<sup>٤٢</sup>

Artinya: “dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah<sup>42</sup>,”

Dalam ayat tersebut tidak ditegaskan rujuk dengan perkataan atau dengan perbuatan. Selanjutnya hukum mempersaksikan di dalam ayat ini hanya sunnat, bukan wajib. Alasannya ulama sepakat bahwa mempersaksikan talaq ketika suami menjatuhkan talaq tidak wajib, demikian pula hendaknya ketika rujuk, apabila rujuk itu meneruskan perkawinan yang lama, sehingga tidak perlu wali dan kesedian bekas istri untuk dirujuki. Mencampuri istri yang sedang dalam iddah talaq raj’i itu halal bagi suami yang menceraikannya, ini menurut pendapat Abu Hanifah, dengan alasan bahwa dalam ayat di atas masih menggunakan kata “suami”.

#### 5. Hikmah Disyariatkan Rujuk

Setiap sesuatu yang disampaikan oleh agama itu memiliki hikmahnya. Adapun rujuk juga memiliki hikmah disyariatkannya. Adapun hikmah disyariatkan rujuk itu adalah<sup>43</sup>:

1. Menghindar murka dan kebencian Allah
  2. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya
  3. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindar perpecahan keluarga.
- Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi

<sup>42</sup> Ibid hlm 36

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers 2013) cet. ke 1 hlm. 255



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan yang telah mempunyai keturunan. Kiranya tidak perlu dibuktikan, bahwa pecahnya hubungan perkawinan orang tua akan membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan jiwa perkembangan si anak. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

4. Mewujudkan ishlah dan perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami-istri bersifat antarpribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Karena itu ishlah perlu mendapat penekanan. Firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”

## B. Maqashid Syariah

### 1. Pengertian Maqashid asy-Syari'ah

- a. Secara Etimologi



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari segi bahasa *Maqashid syariah* berasal dari dua kata, yaitu kata *Maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan masdar dari kata (قصد - يقصد - مقصدا)<sup>44</sup> yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”.

Sedangkan kata *syari'ah*, secara kebahasaan kata *syari'ah* pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syari'ah* untuk pengertian jalan yang lurus (الطريقة المستقيمة). Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.<sup>45</sup>

Kata *syariah* banyak terdapat di dalam al-Qur'an, misalnya firman Allah swt. dalam Q.S Al-Jatsiyah : 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”<sup>46</sup>

Makna syariah pada ayat ini adalah peraturan atau cara beragama.

Sedangkan dalam Q.S Asy-Syura ayat 13 bermakna memberikan tata cara beragama:

<sup>44</sup> Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm.. 891.

<sup>45</sup> Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm.13.

<sup>46</sup> Kemenag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Abyan, 2017), cet ke 7 hlm 500





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: “Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).”<sup>47</sup>

Dari beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kata syariah bermakna peraturan, agama dan tata cara ibadah.

Menurut istilah, kata *syariah* memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya :

1. Yusuf Qardhawi:<sup>48</sup>

الشريعة هي ما شرعه الله تعالى لعباده من الدين، أو ما سنّه من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحجّ والزكاة وسائر أعمال البر.<sup>49</sup>

Artinya : “Syari’ah adalah apa yang disyari’atkan oleh Allah ta’ala kepada hamba- Nya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama tersebut, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan.”

<sup>47</sup> Kemenag Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Aabyan, 2017), cet ke 7 hlm. 484

<sup>48</sup> Yusuf Qardhawi lahir di Salaf Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Beliau adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, dan mantan dekan Fakultas Syari’ah Universitas Qatar. Nama lengkapnya ialah Muhammad Yusuf al-Qardhawi. Dalam kehidupannya, beliau banyak mengarang buku-buku yang berhubungan dengan hukum Islam, termasuk dalam bentuk fatwa-fatwa beliau terhadap persoalan yang dihadapkan kepada beliau. (Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1448.

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari’ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah Ar-risalah, 1993), hlm. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mahmud Syaltut:<sup>50</sup>

والشريعة هي النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه، وعلاقته بأخيه المسلم، وعلاقته بأخيه الإنسان، وعلاقته بالكون وعلاقته بالحياة<sup>51</sup>

*Artinya* : “Syari’ah adalah aturan-aturan yang disyari’atkan oleh Allah, atau aturan yang disyari’atkan dasar-dasarnya supaya manusia mengambil untuk dirinya dalam hubungan manusia tersebut dengan Tuhannya, saudaranya yang muslim, manusia yang lain, lingkungan dan dengan kehidupannya secara umum”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa *syariah* mencakup tentang aturan dan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Menurut Yusuf Qardhawi, kalimat syariah dalam pengucapan para ulama mengandung dua pemahaman :<sup>52</sup>

1. Agama secara menyeluruh, terkait akidah, syiar-syiarnya, adab, akhlak, hukum dan muamalahnya. Maknanya; bahwasanya syari’ah mencakup *ushul* dan *furu’*, keyakinan dan ‘amal (perbuatan), teori dan penerapan (praktek), maka ianya mencakup segala sisi keimanan dan keyakinan – ketuhanan, kenabian dan *samm’iyat*-. Sebagaimana iya juga mencakup hal lainnya dari ibadah, muamalah, dan tata krama, dari setiap yang

<sup>50</sup> Mahmud Syaltut lahir di Mesir pada tanggal 23 April 1893 dan wafat pada tanggal 19 Desember 1963, adalah seorang ulama besar dan merupakan tokoh pemikir Islam yang berwawasan pembaharuan. Beliau juga merupakan ahli fiqh dan tafsir yang menjadi rektor Universitas al-Azhar pada tahun 1958-1963. (Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, *Op,Cit*, hlm. 1689)

<sup>51</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islam ‘Akidah wa Syari’ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1968), hlm. 10.

<sup>52</sup> Yusuf Qardawi, *Dirasat fi Fiqhi Maqhosid al-Syari’ah*, (Kairo: Daar al-Syuruq, 2008), hlm. 19.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibawa oleh *risalah* Islam, dan yang terkandung di dalam al-Quran dan Sunnah, dan yang dijelaskan oleh para ulama akidah, fiqih dan akhlak.

2. Dari sisi *tasyri'* *'amaliy* (hukum amalan) di dalam agama, diantaranya ibadah, dan muamalah, yang mana hal tersebut mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah, serta juga mencangkup urusan keluarga (*ahwal al-syakhsiyyah*), masyarakat, umat, negara dan hukum, serta hubungan antar negara.

#### b. Secara Terminologi

Para ulama terdahulu yang menulis tentang *Maqashid* mereka tidak mendefenisikan *maqashid* itu sendiri, hal itu dikarenakan oleh sebagian besar mereka memasukkan pembahasan *maqashid* kedalam pembahasan *ilat*, *mashlahat* di dalam ilmu ushul fiqih, dan sebagian ulama jikalau pun mereka menulis pembahasan khusus tentang *maqashid*, mereka tidak memberikan defenisi yang terbatas dalam hal ini.

Imam al-Ghazali<sup>53</sup> mengatakan :

نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو: أن يحفظ عليهم دينهم، وأنفسهم، وعقولهم، ونسلهم وأموالهم، فكل ما يتضمن

<sup>53</sup> Imam al-Ghazali : Abu hamid bin Muhammad bin Muhammad Al ghazali merupakan salah seorang ulama dan imam dalam mazhab Syafi'i, dilahirkan di kota Tus, Iran pada tahun 450 Hijriyah, diantara karyanya adalah kitab *Ihya' 'Ulumuddin*, kitab *al-Mustashfa min 'Ilmil Ushul*, wafat pada tahun 505 Hijriyah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المحافظة على هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو

مفسدة ودفعها مصلحة<sup>54</sup>

*Artinya* : “Yang kami maksud dengan kemashlahatan yang dijaga atas dasar tujuan syariat, dan maksud (tujuan) dari syariat terhadap manusia ada lima, yaitu; untuk menjaga agama mereka, diri mereka, akal mereka, keturunan mereka dan harta mereka, dan setiap yang dijaga dari kelima hal ini maka ia merupakan kemashlahatan, dan setiap yang dapat menghilangkan kelima hal tersebut merupakan mafsadah dan menjaganya merupakan suatu mashlahat”

Al-Ghazali tidak memberikan defenisi yang terperinci tentang *maqhasid* dalam hal ini, hanya menyebutkan kata *maqhasid* dan membatasinya hanya pada cara memelihara dan melindunginya.

Nu'man Jughaim berkata: “Tidak ada defenisi yang jelas menurut istilah tentang *maqashid syariah* menurut para ulama ushul terdahulu, bahkan Imam Syathibi<sup>55</sup> sendiri yang merupakan ulama pertama yang menulis buku tersendiri mengenai *maqashid syariah* pun tidak mendefenisikan *maqashid syariah* di dalam bukunya tersebut, kemungkinan tidak adanya defenisi oleh para ulama terdahulu mengenai *maqashid syariah*

<sup>54</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmial-Ushul*, (Beirut: Daar al-Risalah al-'Alamiyah, 2012), Jilid 1, hlm. 417.

<sup>55</sup> Tanggal dan tahun kelahiran Imam al-Syathibi tidak diketahui secara pasti, demikian juga dengan latar belakang keluarganya. Sejauh dapat dilacak, beliau berasal dari bangsa Arab, suku Lakhmi. Sedangkan nama sebutannya, yang dikenal dengan Imam al-Syatibi diambil dari negeriasal keluarganya, yaitu Imam Syathibah. Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Garnati beliau adalah seorang ahli ushul fiqh, ahli bahasa Arab, dan ulama terkemuka Mazhab Maliki. Beliau meninggal di Granada, Spanyol 8 Sya'ban 790 H/1388M, (Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 1699.)





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan adanya perdebatan tentang teori batasan definisi oleh para ahli mantiq”.<sup>56</sup>

Walaupun tidak ada definisi yang jelas tentang *maqhasid syariah* dari para ulama terdahulu baik dari kalangan ulama ushul fiqh yang mengategorikan pembahasan *maqhasid* kedalam pembahsan ‘ilat dan *mashlahat* seperti al-Ghazali di dalam kitabnya *al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul* maupun ulama yang secara khusus menulis tentang ilmu *maqhasid syariah* seperti al-Syatibi di dalam kitabnya *al-muwafaqat fi Ushul Syari’ah* tetapi ulama-ulama yang datang kemudian dari kalangan *mutaakhirin* seperti Syaikh Thahir bin ‘Asyur<sup>57</sup>, Ar-Raisuni,<sup>58</sup> dan Nuruddinal-Khadimi<sup>59</sup> memberikan definisi menurut istilah yang jelas terhadap *maqashid syariah* sebagai *jumlah idhofiy*.

1. Thahir bin ‘Asyur :

<sup>56</sup> Nu’mam Jughaim, *Turuqul Kasyfi ‘an Maqashid asy-Syaari’*, (Amman: Dar an-Nafais, 2013), hlm. 24.

<sup>57</sup>Thahir bin ‘Asyur : Muhammad Thahir bin Muhammad bin ‘Asyur, Ketua Mufti mazhab Maliki di Tunisia, dan Imam besar (Syaikh) Masjid Zaitunah serta Rektor Universitas Zaitunah. Lahir pada tahun 1879 M dan wafat 1973 M di Tunisia. Diantara karyanya adalah *Maqashid asy-Syari’ah al-Islamiyah*, *Ushul an-Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam*, dan *tafsir at-Tahrir wat-Tanwir*.

<sup>58</sup> Ar-Raisuni : Ahmad Raisuni, Wakil Ketua Persatuan Ulama Islam Se-Dunia, pengajar ushul fiqh dan maqhasid syariah di Universitas Muhammad V, Maroko. Lahir pada tahun 1953 M di Maroko. Diantara karyanya kitab *Maqhosidul maqashid*, *Nazhortiyatul Maqosid ‘Inda al-Imam al-Syatibi*, dan *Madkhol ila Maqosid al-Syariah*.

<sup>59</sup> Nuruddin al-Khadimi : Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, Menteri Agama Tunisia pada tahun 2011 - 2014, pengajar Maqhasid syariah di Universitas Zaitunah, Tunisia. Lahir pada tahun 1963 M di Tunisia. Diantara karyanya adalah kitab *al-Ijtihad al-Maqosidi*, *‘Ilmu al-Maqhosid al-Syar’iyyah*, dan *Al-maqashid fil Mazhab al-Malikiy*.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة<sup>60</sup>

*Artinya* : “Yaitu ma‘ani (makna-makna) dan hikam (hikmah-hikmah) yang terlihat [dikehendaki] asy-Syari‘ (Allah) dalam seluruh atau sebagian besar ahwal pembentukan syariat, tidak terbatas pada jenis hukum syariat tertentu saja; dengan demikian termasuk dalam (pengertian) ini awsaf syariat, tujuan syariat yang umum.

## 2. Ar-Raisuni

إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد<sup>61</sup>

*Artinya* : “Sesungguhnya maqashid syari’ah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syari’at untuk kemaslahatan hamba (manusia).”

Dalam hal ini Ar-Raisuni memberikan defenisi yang lebih jelas tentang *maqhasid syariah*, hal itu dapat dilihat dari defenisi yang dikemukakannya di dalam bukunya tersebut bahwa *maqashid syariah* merupakan tujuan yang ditetapkan oleh Allah melalui syariat yang tujuan utamanya adalah untuk kemashlahatan hamba (manusia).

## 3. Nuruddinal-Khadimi

<sup>60</sup>Thahir bin ‘Asyur, *Maqashid Syariah al-Islamiyah*, (Kairo: Daar as-Salam, 2012), hlm. 55.

<sup>61</sup>Ahmad ar-Raisuni, *Nadzhoriyatul Maqashid ‘Inda al-Imam al-Syatibi*, (Viriginia: al-Ma’had al-‘Alami lil Fikri al-Silami, 1995), hlm. 19.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حكماً جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين<sup>62</sup>

*Artinya* : “Yaitu ma’ani (makna-makna) yang terlihat pada hukum-hukum syariat, dan tersusun pada hukum-hukum tersebut, sama saja apakah ma’ani (makna-makna) tersebut berupa hikmah (hikmah-hikmah) yang bersifat juz’i (terperinci) atau masholih (mashlahat-mashlahat) yang bersifat kulliy (umum) atau simat (ciri-ciri) yang bersifat universal, dan ia terhimpun dalam satu tujuan, yaitu pernyataan ‘ubudiyah kepada Allah dan demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat . «

Dalam definisi ini dijelaskan bahwa *maqashid syariah* merupakan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam hukum-hukum syariat yang bersifat umum, universal atau terperinci, yang mana hikmah tersebut bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh al-Syathibi di dalam bukunya *al-Muwafaqat*, ia menyatakan:

إنَّ وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً<sup>63</sup>

*Artinya*: “Sesungguhnya pembuatan syari’at bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan *maqashid syari’ah* adalah kemaslahatan manusia. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya Allah tidak lah menciptakan sesuatu secara percuma, dan tidak pula mensyariatkan sesuatu

<sup>62</sup> Nuruddin al-Khodimi, *al-Ijtihad al-Maqashidi Hujjiyatuhu Dowabituhu Majalatuhu* (Doha: Wizarah Awqaf wa asy-Syu’un al-Islamiyah, 1998), hlm. 52.

<sup>63</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah* (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), hlm.220.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sia-sia, tetapi Allah menciptakan sesuatu disebabkan karena ada hikmah yang terkandung dibalik perintah dan larangan-Nya, dan Allah swt. mensyariatkan sesuatu untuk satu tujuan, hikmah dan tujuan tersebut adakalanya kembali kepada Allah atau kembali kepada makhluk-Nya, maka yang pertama tidaklah benar, karena Allah Maha Kaya dari semua makhluk ciptaan-Nya, maka setaat-taat apapun seorang hamba, atau sedurhaknya ia, hal itu tidak akan menambah atau pun mengurangi kebesaran Allah swt.<sup>64</sup>, Allah swt. berfirman di dalam surah Al-Fatir ayat 15:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

Artinya: “Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dialah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.”<sup>65</sup>

Maka ketaatan yang diinginkan oleh Allah dari seorang hamba, sesungguhnya hal itu demi kemaslahatan hamba itu sendiri. Oleh karena itu, perintah dan larangan yang Allah tetapkan di dalam syariat Islam seluruhnya memiliki *maqashid*, baik Allah sampaikan secara langsung di dalam Al-Quran, atau Allah sampaikan melalui sabda-sabda Nabi Muhammad saw, dan adakalanya *maqashid syariah* terhadap suatu perintah atau larangan dapat diketahui langsung oleh hamba melalui ayat al-Quran, sunnah, *ijma'* atau melalui *istiqro'* (kajian) oleh para ulama.<sup>66</sup>

<sup>64</sup>Muhammad Bakar Ismail Habib, *Maqashid al-Syariah Ta'siilan wa Taf'iilan*, (tt: Rabithah al-' Alam al-Islami, 2012), hlm. 18.

<sup>65</sup>Kemenag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Abyan, 2017), cet. ke 7 hlm. 436

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm. 140.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang *faqih* dituntut untuk memahami *maqashid syariah* dalam *istinbath* atau mengeluarkan suatu hukum terhadap kejadian atau fenomena yang terjadi pada masanya.<sup>67</sup> Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.<sup>68</sup> Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.<sup>69</sup>

Pengetahuan umat islam terhadap *maqashid* (tujuan) suatu hukum juga semestinya harus ada, dikarenakan syariat Islam merupakan syariat yang diturunkan untuk hamba-hamba Allah swt, dan ketika umat Islam pada umumnya mengetahui tujuan dari pada syariat Islam secara umum atau pun terperinci terhadap setiap hukum yang ada yaitu untuk kebahagiaan manusia, kemashlahatan dan menolak kemudhratan dan kerusakan bagi mereka di dunia dan di akhirat, maka hal itu akan menepis keraguan mereka untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.<sup>70</sup>

<sup>67</sup>Thahir bin 'Asyur, *op.cit*, hlm. 15.

<sup>68</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. ke 1 hlm. 124.

<sup>69</sup>Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al- Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. ke 3 hlm. 42.

<sup>70</sup>Muhammad Bakar Ismail Habib, *op.cit*, hlm. 126.



## 2. Pembagian *Maqashid asy-Syariah*

Menurut al-Syatibi, secara umum *maqhasid syariah* (tujuan-tujuan syariat) itu terbagi kepada dua bagian, yaitu; *maqashid* (tujuan-tujuan) yang kembali kepada tujuan sang pembuat syariat yaitu, Allah swt, dan *maqashid* yang kembali kepada maksud atau tujuan para *mukallaf* (manusia).<sup>71</sup>

Adapun dalam hal *qashdu syari'* (tujuan sang pembuat syari'at) yaitu Allah swt. maka ada 4 hal yang menjadi aspek dalam penetapan hukum, yaitu:<sup>72</sup>

1. Maksud *syari'* dalam pembuatan syariat.
2. Maksud *syari'* dalam pembuatan hukum untuk dipahami
3. Maksud *syari'* dalam membuat hukum sebagai pembebanan hukum (taklif) yang harus dilakukan.
4. Maksud *syari'* dalam membuat hukum dalam memasukkan *mukallaf* di bawah cakupan hukumnya.

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqashid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqashid* ini hanya ada tiga yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*.<sup>73</sup>

### 1. *Dharuriyat*

Makna dari pada *dharuriyat* disini adalah sesuatu yang mesti ada dalam pelaksanaan kemashlahatan untuk agama dan dunia, yang mana jika

<sup>71</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *op.cit*, hlm. 219.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 219.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 221.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal tersebut hilang atau tidak terlaksana maka akan mengancam kemashlahatan, bahkan berdampak kepada terjadinya *fasad* (kerusakan) dan mengancam kehidupan di dunia dan di akhirat mendapat siksa.<sup>74</sup>

Imam Juwayniy telah mengemukakan, yang kemudian dikembangkan oleh Al-Ghazali dan al-Syatibi untuk memelihara *dharuriyat* dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada kemaslahatan pada mereka. Yaitu semua syariat yang tercakup dalam lima hal, *al-kulliyat alkhamasah*.<sup>75</sup> Menurut Syatibi, dalam hal *dharuriyat* ada lima hal yang harus dijaga, yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.<sup>76</sup>

Untuk menjaga syariat demi kemashlahatan *dharuriyat* dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu<sup>77</sup> :

1. Menjaga dan memeliharanya dari sisi *wujud* (tetap ada) dengan cara melaksanakan perintah syariat dan mendirikan rukun-rukunnya serta memperkuat pondasinya.
2. Menjaga dan memeliharanya dari sisi *'adam* (tidak ada) dengan cara mencegah atau menghindarkannya dari hal-hal yang dapat mengganggu dan dan membuat ketidakseimbangan pada masa sekarang dan akan datang.

Adapun cara menjaga *maqashid dharuriyat* dari dua sisi tersebut diantaranya, yaitu :<sup>78</sup>

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Ahmad Mursi Husain Jauhar, *op.cit*, hlm 15.

<sup>76</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *op. cit*, hlm. 222.

<sup>77</sup> Ahmad ar-Raisuni, *op. cit*, hlm. 146.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. *Hifdz ad-din* (menjaga agama)

Untuk menegakkan agama, Islam mewajibkan iman, terutama rukun iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang lima.

Sedangkan untuk menjaga agama, Islam mewajibkan jihad untuk melawan setiap musuh-musuh agama yang membuat fitnah dan tujuannya adalah menolak *mafsadah* yang bisa ditimbulkan. Juga disyariatkan *had* bagi orang-orang yang murtad, agar tidak menjadikan agama Islam sebagai mainan.<sup>79</sup> Dan semua ini merupakan keutamaan dari Allah swt. yang menjamin terjaganya agama ini. Allah swt. berfirman :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.”<sup>80</sup> (Q.S al-Hijr: 19)

#### b. *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa)

Allah swt. berfirman didalam al-Quran surat al-Isra’ ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka

<sup>78</sup> Muhammad Bakar Ismail Habib, *op.cit*, hlm. 309.

<sup>79</sup> Muhammad az-Zuhailiy, *Mausu'ah Qodhoya Islamiyah Mu'ashirah*, (Damaskus: Daar al-Maktabiy, tt), Jilid V, hlm. 639.

<sup>80</sup> Kemenag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Abyan, 2017), cet ke 7 hlm 236





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan<sup>81</sup>.”

Untuk terjaminnya eksistensi jiwa, Allah memerintahkan manusia untuk makan dan minum, menggunakan pakaian dan memiliki tempat tinggal,<sup>82</sup> sebagaimana Allah swt. juga mewajibkan pemberian nafkah kepada setiap manusia yang memiliki kewajiban dan tanggungan nafkah, seperti kewajiban nafkah seorang ayah terhadap anaknya, suami terhadap istri yang ditalak dan berada dalam masa iddah atau berada dalam keadaan hamil, juga diwajibkan terhadap seorang ibu untuk menyusui anaknya. Secara umum dapat dipahami bahwa *hifz an-nafs* (menjaga diri) dari sisi *wujud* (tetap ada) adalah dengan melaksanakan setiap perintah yang mengarah kepada penjagaan eksistensi jiwa manusia. Bahkan di dalam keadaan darurat yang mengarah kepada hilangnya jiwa seseorang maka ia diperbolehkan mengonsumsi hal-hal yang dilarang. Allah swt. berfirman di dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173,<sup>83</sup>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

<sup>81</sup> Ibid hlm 289

<sup>82</sup> Ibid, hlm. 640.

<sup>83</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqotuha bil Adilla al-Syar'iyah*, (KSA: Dar al-Hijrah linnasyri wa at-Tauzi', 1998), hlm. 229.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan untuk menjaga jiwa dari sisi ‘adam. Allah swt. mensyariatkan hukum-hukum yang menjaga jiwa manusia dari kebinasaan, dan Allah swt. mengharamkan setiap manusia untuk menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, Allah swt. berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195:

إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik<sup>84</sup>.”

Oleh sebab itu diharamkan segala perbuatan yang mengarah kepada kemudharatan, dan diharamkan juga mengkonsumsi hal-hal yang dapat memberikan kemudharatan kepada jiwa manusia.

Dan juga disyariatkan hukuman *qishas* bagi setiap orang yang melukukan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain.

#### c. *Hifz al-‘aqliy* (menjaga akal)

Akal memiliki peranan dan fungsi yang besar terhadap tubuh manusia, dengan akal manusia mengenal tuhan dan memahami segala perintah dan larangan. Dan dengan akal juga seorang manusia dianggap sebagai *mukallaf* yang dibebankan kepadanya syariat.

Untuk menjaga akal, Islam mewajibkan untuk menuntut ilmu, menjamin kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat serta menjaga kesehatan akal demi kesehatan tubuh. Sedangkan untuk memelihara akal,

<sup>84</sup>Kemenag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ayan, 2017), cet. ke 7 hlm. 30



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam mengharamkan *khomar* (minuman yang memabukkan) dan obat-obatan terlarang, dan Islam mensyariatkan *had* bagi siapa saja yang meminum *khomar* dan sejenisnya demi terjaganya akal manusia.<sup>85</sup>

#### d. *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan)

Untuk menjaga keberadaan manusia dan menyembah Allah untuk batas yang dikehendak oleh Allah di dunia, Allah swt. menjadikan berketurunan sebagai jalannya. Untuk memelihara keturunan, Islam mensyariatkan pernikahan yang sesuai syariat,<sup>86</sup> dan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga (*ahwal al-syakhsyah*) bertujuan untuk memelihara dan menjaga keturunan.

Untuk menjaga keturunan dari sisi 'adam, Islam mengharamkan perbuatan zina dan menghukum pelakunya. Islam juga melarang manusia untuk meninggalkan pernikahan,<sup>87</sup> membuang rahim dan menggugurkan kandungan bagi wanita hamil.<sup>88</sup> Juga diharamkan melakukan pernikahan yang dianggap *fasid* oleh agama seperti nikah *mut'ah*, karena bertentangan dengan maksud pernikahan itu sendiri yaitu menjaga keturunan, nasab, memunculkan kasih sayang serta memberikan tanggung jawab.

#### e. *Hifdz al-maal* (menjaga harta)

Harta merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, karena harta merupakan *wasilah* untuk menjalankan

<sup>85</sup> Muhammad az-Zuhailiy, *op. cit*, hlm. 640.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 258.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 260.

<sup>88</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *op. cit*, hlm. 268.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan, dengan harta pula *kuliyatul khamsah* yang lain dapat tercapai, seperti *hifdz ad-din* melaksanakan zakat, dan haji, *hifdz an-nafs* berupa makan, minum dan nafkah, *hifdz an-nasl* berupa menikah, *hifdz al-‘aql* berupa belajar.

Untuk menjaga harta, Allah swt. mensyari’atkan manusia untuk berusaha mencari harta, Allah swt. berfirman di dalam al-Quran surat al-Muluk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”<sup>89</sup>

Sedangkan menjaga harta dari sisi ‘*adam*, Allah swt. mengharamkan perbuatan mencuri dan segala perbuatan buruk yang mengambil harta orang lain dengan cara yang dilarang seperti korupsi, serta memberikan hukuman potong tangan kepada setiap pencuri dengan kadar tertentu.

Islam juga memperingatkan manusia untuk tidak berlaku bakhil dan kikir dengan hartanya, juga mengharamkan menggunakan harta untuk melakukan kemaksiatan.

#### 2. *Hajiyat*

*Hajiyat* adalah *masalahah* yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia.

Sekiranya *masalahah* itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia

<sup>89</sup> Kemenag Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Abyan, 2017), cet. ke 7 hlm. 563





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi *mukallaf*, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyari'atan *rukhsah* yang meringankan *taklif* dalam beribadah bagi *mukallaf* yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (*musafir*).<sup>90</sup>

Mengenai hal ini, terdapat kaidah fiqh yang dapat dipakai sebagai penguat bagi kemaslahatan yang bersifat *hajiyyat* ini, yaitu:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة<sup>91</sup>

*Artinya* : "Kebutuhan (hajat) menduduki posisi dharurat, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus."

Prinsip utama dalam mewujudkan hal-hal yang *hajiyyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan manusia bermuamalat dan tukar menukar manfaat. Dalam bidang ibadah, Islam memberikan *rukhsah* dan keringanan bila menjalankan kewajiban. Misalnya di bolehkan seseorang tidak puasa pada bulan ramadhan, karena ia sakit atau dalam perjalanan; diperbolehkan meng-*qasar* sholat yang empat rakaat bagi orang yang sedang dalam perjalanan;<sup>92</sup> diperbolehkan tayamum bagi orang yang tidak mendapatkan air atau tidak dapat menggunakannya, dibolehkan shalat sambil duduk bagi orang yang tidak sanggup melaksanakannya sambil berdiri, serta diperbolehkannya mengeluarkan pendapat atas kejadian yang menimpanya demi kebaikan semua orang dan lain sebagainya.

#### 3. *Tahsiniyat*

<sup>90</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *op. cit*, hlm. 222.

<sup>91</sup> Muhammad Zuhailiy, *al-Qowa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzhah al-Arba'ah*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2006), hlm. 288.

<sup>92</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *op. cit*, hlm. 222.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Tahsiniyyat* adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan lain sebagainya.<sup>93</sup>

Pelaksanaan *maqashid syari'ah* yang bersifat *tahsiniyyah* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

<sup>93</sup>*Ibid*, hlm. 223.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Rujuk dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang terpuji, karena setelah pasangan suami istri itu mengalami masa-masa kritis diantara mereka yang diakhiri dengan perceraian, timbul kesadaran baru dan napas baru untuk merajut tali perkawinan yang pernah putus asa guna merenda hari esok yang lebih baik lagi. Masalah rujuk ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Bab XVIII Pasal 163, 164, 165, 166 dan 167.

Penjagaan terhadap eksistensi *ad-dhoruriyat al-khamsah* dengan menetapkan rujuk di Pegawai Pencatat Nikah dapat dirincikan sebagai berikut:

##### a. *Hifdz ad-din* (menjaga agama)

Ketika rujuk itu dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah, maka itu telah menjadi bukti bahwa suami telah mempunyai hak dan memiliki kewajibannya kembali sebagai suami, begitu juga dengan istri maka ia telah mempunyai kewajiban dan mendapatkan hak nya sebagai istri.

##### b. *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa)

Ketika rujuk itu dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka jika suami tidak menjalankan kewajibannya yaitu dalam memberikan nafkah. Istri dapat meminta hak nya tersebut melalui pengadilan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. *Hifdz al-‘aqli* (menjaga akal)

Dengan melakukan rujuk di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka sesuai pasal 167 ayat 5, maka ini telah memberi maslahat yaitu pemberian ilmu kembali kepada suami dan istri tentang pentingnya pernikahan dan hal-hal yang kewajiban setelah rujuk.

#### d. *Hifdz an-nasl* (menjaga keturunan)

Pencatatan rujuk di hadapan Pegawai Pencatat Nikah itu memberikan bukti hukum ketika istri hamil setelah rujuk dengan suami, maka anak yang dikandung oleh istri itu adalah anak dari suami.

#### e. *Hifdz al-mal* (menjaga harta)

Dengan adanya rujuk di Pegawai Pencatat Nikah dan rujuk tersebut tercatat, hal ini akan memberikan aturan yang membantu keluarga suami dan istri dalam pembagian ini dan terhalang dari ancaman Allah dalam pembagian warisan.

### B. Saran

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang aturan rujuk yang ada di Indonesia bahwa rujuk di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Kantor Urusan Agama (KUA) harus lebih giat melakukan penyuluhan serta sosialisasi, terutama kepada pasangan yang hendak menikah.
2. Untuk terlaksananya aturan tersebut maka diharapkan kepada pasangan suami istri yang hendak bercerai setelah upaya perdamaian melalui keluarga kedua belah pihak tidak berhasil untuk menyampaikan maksud

perceraian melalui Pengadilan Agama dan mengikuti proses selanjutnya di pengadilan tersebut, tidak menjatuhkan talak secara sewenang-wenang tanpa aturan. Lalu jika timbul niat untuk kembali, maka diharapkan untuk rujuk di hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar segera terdaftar kembali menjadi pasangan suami dan istri

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Said bin, *Risalah Nikah*, ( Jakarta:Pustaka Amani,2002) cet. ke 1
- Ad-Dardiri, Abu Al-Barakah Ahmad Bin Muhammad, *Syar Ash-shaghir Aqrabi Al-Masalik Illa Mazhab Al-Imam Malaik*, Kairo : Daar Al-Ma'arif
- Ahmad, Amrullah dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr.H, Busthanul Arifin, SH*, (Jakarta; Gema Insani Pers, 1996) cet. ke 1
- Aladip, Moh. Machfuddin, *Terjemahan Bulughul Maram*, Semarang: PT Toha Putra
- al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*. (Beirut, Daar al-Risalah al-'Alamiyah, 2012)
- al-Hafid, Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid*. Juz II. (Cairo: Dar al-Hadits, 2004)
- al-Hamdani, Sa'id bin Abullah bin Thalib. *Risalah Nikah*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) cet. ke 1
- al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin*. Juz III. (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1993)
- al-Jaziri, Abdur Rohman. *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'*. (Beirut: Daarul Kutub Al-'Ilmiyah, 1996)
- al-Jundiy, Samih Abdul Wahab. *Ahammiyah al-Maqasid fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Atsaruha fi Fahmi al-Nas wa Istinbat al-Kukm*. (Beirut: Muassasah al-Iisalah nasyirun, 2008)
- al-Khodimi, Nuruddin, *al-Ijtihad al-Maqashidi Hujjiyatuhu Dowabituhu Majalatuhu* (Doha: Wizaroh Awqof wa asy-Syu'un al-Islamiyah, 1998)
- al-Qathtan, Manna ,*Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001)
- al-Syathibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- al-Yubi ,Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud,1998, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqotuha bil Adilla al-Syar'iiyyah*, KSA: Dar al-Hijrah linnasyri wa at-Tauzi'
- ar-Raisuni, Ahmad, *Nadzhoriyatul Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Viriginia: al-Ma'had al-'Alami lil Fikri al-Silami, 1995)
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 9. (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- az-Zuhailiy, Muhammad. tt. *Mausu'ah Qodhoya Islamiyah Mu'ashirah*. Damaskus: Daar al-Maktabiy
- 'Asyur. Thahir bin, *Maqashid Syari'ah al-Islamiyah*,(Kairo: Daar as-Salam, 2012)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 1999) cet. ke 2
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilas Hukum Islam dan Peradilan Agama dan System Hukum Nasional*, (Jakarta.: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1999) cet. ke 2
- Dahlan ,Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* , (Jakarta:PT Intermasa, 1996), cet. ke 2
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*,( Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997) cet. ke 1
- Ghofar ,Abdul., *ar Raja'ah fi al-Islam*
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008) cet. ke 5
- Hakim, Abdul Hanid *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta:Maktabah Sa'adiyah Putra)
- Harahap, Yahya, "*Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Memositifkan Abstraki Hukum Islam*", dalam *Mimbar Hukum*, No.4 Tahun II,1991, ,(Jakarta: Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Departemen Agama, 1991) cet. ke 1





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006) cet. ke 1
- H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- H.Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. ke 1
- Juham, Nu'man, *Turuqul Kasyif an Maqashid asy-Syari'*, (Amman: Dar an-Nafais, 2013)
- Kemenag Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Abyan, 2017), cet. ke 7
- Murtadha, Muhammad Mutawil dan Rahmah, *Mahar dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: Kaifa Publishing, 2018) cet. ke 1
- Nuruddin, Aminur dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Qardhawi, Yusuf, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah Ar-risalah, 1993)
- , *Dirasat fi Fiqhi Maqashid al-Syari'ah*, (Kairo: Daar al-Syuruq, 2008)
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.) cet. ke 1
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana, 1999) cet. ke 3
- Sjadzali, Munawir, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*", dalam Tjun Surjaman, *Hukum Islam di Indonesia dan Praktek*, (Bandung: Rosda Karya, 1999) cet. ke 1
- Syanfuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006) cet. ke 5
- Sahrani, Hitami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009) cet. ke 1
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam 'Akidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1968)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakariyya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)

Zuhaili, Wahbah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1997), jilid 9



UIN SUSKA RIAU

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**DAFITRI AKBAR**

**11521101210**

**HUKUM KELUARGA**

*Tinjauan Maqasyid Syariah Terhadap Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam  
Tentang Rujuk Di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah*

**Syukran M.Sy**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 28 Januari 2020

Pimpinan Redaksi



**M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL**  
NIK. 198804302019031010

1. Hak cipta Dilindungi Undang-Undang  
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
3. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa  
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk Di Hadapan Pegawai Pencatat Pernikahan** yang ditulis oleh :

Nama : **Dafitri Akbar**  
NIM : **11521101210**  
Program Studi : **Hukum Keluarga**

Teladi dimunaqasyahkan pada :  
Hari/Tanggal : **Rabu, 11 Desember 2019**  
Waktu : **07.30 WIB**  
Tempat : **Ruang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum**

Teladi di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dermawan Tia Indrajaya, S.Ag. M.Ag**

Sekretaris  
**Afrizal Ahmad M.Sy**

Penguji I  
**Dr. H. Mohd. Yunus, MA.**

Penguji II  
**Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA**

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Eri Susanto, SH.I**  
NIP. 19670218 199303 1 006

© Hakipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim